PALING
EFEKTIF
BERIKLAN
7975576
7975635

SAJIAN INFORMASI MASA DEPAN

Berita Buana

25 Agustus 1998 | No. 009 Tahun ke-28 | Harga Rp 1.500

LIPUTAN UTAMA
NASIONAL ..... Halaman 3
LIPUTAN UTAMA
EKONOMI ..... Halaman 6
FORUM PARTAI ..... Halaman 4

Empat Panser Jaga Rumah Prabowo

Jakarta,Buana

Sedikitnya, empat kendaraan lapis baja (panser) dan puluhan petugas yang dipimpin perwira berpangkat mayor tampak berjaga-jaga di sekitar rumah Letjen (Purn) Prabowo Subianto di Jl Cendana, Jakarta, Senin (24/8) malam, tepatnya beberapa jam setelah ankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan katan' mantan Danjen Kopassus itu dari ABRI.

ain itu, penjagaan ekstra ketat tampak pula di ujung ngkal Jl Cendana serta di pertigaan Jl Tanjung, Men-Jakarta Pusat. Menurut pemantauan *Buana*, hingga tengah malam, sejumlah petugas berseragam ABRI n yang berpakaian batik tampak mondar-mandir di ngan rumah perwira yang terlibat dalam aksi pencu-ktivis prodemokrasi itu. Jika ada orang datang, ter-wartawan, langsung dihampiri petugas dan dengan angsung mengadakan aksi penghalauan.

mi telah diintruksikan agar membubarkan setiap ada nan orang di sekitar rumah ini," kata petugas jaga, yang ku langsung mendapat perintah dari Prabowo. "Sebab i memohon pengertian semua para wartawan agar tidak mpul di sekitar rumah ini," kata petugas itu lagi.

t ditanya, di mana Prabowo kini, petugas itu menja-ngkat, "Tidak tahu." Para petugas itu tidak tahu persis, Prabowo berada di Bandung atau Jakarta. Yang jelas, yakan agar tidak terjadi kerumunan di sekitar kediam-nantu mantan Presiden Soeharto ini. Akhirnya, war-yang sedianya hendak menunggu Prabowo di depan nya itu terpaksa pergi menjauh. Senin malam itu, tidak g pun tampak masuk ke rumah jenderal bintang tiga sudah 'dipecat' itu, kecuali petugas keamanan.

mun, menjelang tengah malam, sebuah mobil Hardtop n cepat memasuki rumah Prabowo melalui pintu bela-Beberapa saat kemudian, mobil itu keluar lagi. Saat akan, apakah mobil itu milik Prabowo, petugas jaga ah tersebut mengatakan, "Bukan." Menurutnya, mo-milik adik kandung Prabowo, Hasyim Djojokusumo. Prabowo biasanya masuk ke rumah lewat pintu depan, pintu belakang," ujarnya.

ugas itu kemudian menambahkan, Prabowo dan istri-iti Hediati, saat ini tidak berada di kediaman Jl Cen-Mereka kemungkinan berada di Bandung.

Rasa Keadilan

lain pihak, Kontras menilai, langkah ABRI memberi-nski administratif terhadap Letjen TNI Prabowo dan a lainnya sama sekali mengabaikan tuntutan rasa ke-untuk mengungkap kasus penculikan secara tuntas. Un-Kontras mendesak Puspom ABRI segera menjalankan nya sebagai institusi penyidik, yang wajib memeriksa Perwira Tinggi ABRI tersebut sebagai tersangka.

an Penasihat Kontras Mulyana W Kusumah menilai, n keputusan Pangab itu, Prabowo tidak mungkin di-ilkan? "Saya kira yang akan menentukan nanti bukan ar mekanisme prosedural, tapi arah politik sekarang kan punya *pressure* tersendiri terhadap ABRI untuk ukan langkah-langkah yang tepat dalam merespons i," paparnya.

ggota Komnas HAM Bambang W Soeharto menilai, san itu lebih maju ketimbang yang terjadi lima tahun tuk itu, ia berharap masyarakat mempercayai ABRI. n, ia juga berharap, ABRI menegakkan keadilan dan aran, dengan membawa permasalahan ini ke mah-militer secara terbuka. "Ini masalah penegakan aran dan keadilan, bukan masalah segelintir jenderal. optimistis kalau memang lakukan tindak pidana, h ini pasti ke mahmil," tandasnya.

langkan, mantan Pangkostrad Letjen (Purn) Kemal stru merasa heran terhadap keputusan Pangab yang at Prabowo dari keanggotaan ABRI sebelum perkara salahannya jelas. "Menurut saya, Prabowo sebenar-arus dimahmilkan dahulu, sebelum disidik DKP, tindakannya itu mengandung unsur pidana," ujar Selasa (25/8) pagi.

ua Barisan Nasional ini menilai, Pangab bersikap pi-u. "Saya tidak bisa mengerti keputusan ABRI itu. tampaknya hanya berlaku pada bawahan saja, tidak asan," ujarnya. Untuk itu, ia mengimbau pimpinan agar bersikap adil. "Jangan mentang-mentang letjen, l bintang tiga, lalu dibiarkan membunuh orang se-a saja. Kalau salah, mereka tetap harus dihukum," nya berapi-api. ❑ sab/ana/jar/han/pet/mad

PRABOWO SUBIANTO (KIRI) DAN MUCHDI PR: DPR menilai, kasus penculikan tetap harus diungkap.

Agum: Tak Ada *Bargaining* dengan Prabowo

Jakarta, Buana

Hukuman pemecatan dari ABRI yang dijatuhkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto kepada mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dinilai terlalu ringan. Sehingga, hal ini melahirkan spekulasi, adanya *bargaining* dengan menantu mantan Presiden Soeharto itu. Namun, spekulasi ini dibantah anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar.

"Tidak ada *bargaining* antara Pangab dengan Prabowo, dalam pengambilan keputusan terhadap Prabowo," kata Agum Gumelar, yang juga Gubernur Lemhanas, saat ditemui *Buana* di Jakarta, Selasa (25/8) pagi.

Saat ditanya, apa tanggapannya terhadap ketatnya sistem pengamanan di rumah menantu mantan Presiden Soeharto yang terlibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi itu, dengan singkat Agum mengatakan, "Itu bukan urusan kita".

Sedangkan saat ditanya, kenapa DKP tidak mengeluarkan rekomendasi agar Prabowo segera dimahmilkan, Agum tak langsung menjawab. Dia terdiam sejenak. "Pangab kan sudah bilang, kalau ada unsur untuk dimahmilkan, terutama adanya pengakuan 10 anggota Kopassus yang akan disidangkan, tidak menutup kemungkinan Prabowo juga akan dimahmilkan," ujar Agum.

Sebelumnya, Ny D Utomo—orang tua korban penculikan, Bimo Petrus—menilai, sudah selayaknya Prabowo dipecat. Tapi, bagi keluarganya, ini masih belum cukup setimpal dengan kesalahan yang diperbuat Prabowo. "Enak saja dia cuma dipecat. Sementara anak saya belum juga jelas, bagaimana nasibnya," ujar Ny Utomo.

"Soal pernyataan DKP yang mengatakan hanya menculik sembilan orang. Ini bukti kebohongan lain. Sebab, kalau hanya menculik sembilan orang. Lalu, siapa yang menculik aktivis yang lainnya. ABRI mestinya menjelaskan hal ini juga," ujarnya.

Lain lagi dengan korban penculikan, Andi Arief yang ditemui di Gambir Jakarta, Selasa pukul 04.45. Ia melihat, keputusan Prabowo dipecat dari jabatannya tanpa memasukkannya ke pengadilan mahkamah militer, sebagai upaya untuk menutupi keterlibatan para jendral dalam kasus-kasus lain. Seperti, kerusuhan 14-15 Mei, penembakan mahasiswa Trisakti, Tragedi Lampung, kasus Tanjung Priok, dan lainnya. Gejala ini sebagai bukti, gaya pemerintahan Soeharto masih sangat kuat di tangan kekuasaan Habibie.

Tradisi politik militer Orde Baru, dinilai Andi, memang selalu menghindarkan jenderal masuk Pengadilan Militer. Akhirnya, prajurit yang selalu jadi korban. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi dalam tubuh militer masih belum selesai. Konflik masih berkecamuk. Wiranto juga tampaknya tidak ingin mengambil risiko berat dalam penajaman konflik. Kekuatan Prabowo dan Soeharto ternyata masih bercokol. ❑ dem/sab/pet

SIKSAAN BAGI KORBAN PENCULIKAN

Aktivis	Diculik	Siksaan
Plus Lustrilanang	2 Februari 96	Disetrum. Dimasukkan ke dalam bak dan diinjak-injak kepalanya. "Saya pikir, saya akan mati saat itu," ujarnya.
Andi Arief	28 Maret 96	Diintrograsi dengan tangan diborgol ke meja. Sepanjang intrograsi diancam akan dibunuh.
Faisol Reza	12 Maret 96	Kaki dijnjak dengan kursi. Disundut dengan api rokok. Ditidurkan di balok es dan distrum.
Raharja Waluya Jati	12 Maret 96	Dipukuli bertubi-tubi. Leher dijerat dan talinya ditarik. Mulut dipukuli. Perut diinjak-injak. Disundut rokok. Distrum. Dipaksa tidur di balok es selama 15 menit.
Nezar Patria	13 Maret 96	Distrum. Dipukuli. Ditendang hingga terjengkang.
Trio Johanes Marpaung	10 Agustus 96	Ditelanjangi. Digunduli. Dipukuli dan dipaksa menelan kodok.
Nia Damayanti	7 September 96	Dielus-elus dengan pistol dan dijemur. Akhirnya kandungannya keguguran.
David Kris	21 Agustus 96	Ditendang beramai-ramai. Perutnya diinjak-injak dengan sepatu lars dan dipukuli dengan kursi.

Pusat Data Buana/diolah

Hanya Dipecat, DPR Kecewa

Jakarta, Buana

Keputusan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk tidak membawa mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo Subianto ke Mahkamah Militer (Mahmil) sama sekali tidak memuaskan kalangan DPR. Sebab itu, para wakil rakyat tersebut berpendapat bahwa karena kasus penculikan itu tergolong tindak pidana, aparat kepolisian diminta lebih proaktif untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan negeri.

"Keputusan tersebut sama sekali tidak tuntas, sehingga tidak memuaskan rakyat. Agar masalahnya bisa dianggap tuntas, Prabowo harus dibawa ke Mahmil. Jika hanya dipecat, seperti yang diputuskan pimpinan ABRI, rakyat tetap akan bertanya-tanya," kata Ketua FPP DPR RI Zarkasih Nur di DPR, Senin (24/8).

Menurutnya, jika putusannya sekadar memecat Prabowo dari kesatuan ABRI, bagaimana nasib orang-orang yang hilang, baik yang masih hidup atau sudah mati? Sebab itu, ia berharap, tindakan kriminal yang melanggar HAM (hak asasi manusia) dituntaskan di pengadilan negeri. "Jika pimpinan ABRI tidak memahmilkan Prabowo, aparat hukum bisa membawa kasus itu ke pengadilan negeri. Ini bukan delik aduan. Polisi dapat membawa kasus itu ke pengadilan," tegasnya.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua FKP Korbid Polkam Abu Hasan Sazili. Bahkan, ia mengatakan, tidak cukup sekadar Prabowo yang dibawa ke Mahmil, tapi atasan dan bawahannya yang ikut terlibat harus diseret pula. "Saya melihat ada rekayasa di balik keputusan ini, sehingga membuat rakyat menjadi ragu," ujar Abu Hasan.

Dikatakannya, masyarakat masih bertanya-tanya atas keputusan Pangab tersebut. Namun, ia mengajak semua pihak menghormati keputusan itu tanpa menutup kemungkinan terus melakukan pengungkapan terhadap seluruh kasus orang hilang.

Jika pihak kepolisian mendapat bukti adanya tindak kriminal dalam kasus tersebut, Prabowo harus mendapat perlakuan yang sama, sebagaimana warga sipil lainnya. Dalam pengertian, membawa atau melimpahkan kasus itu ke pengadilan negeri. "Dengan adanya keputusan tersebut, berarti karir militer Prabowo sudah tamat. Yang dituntut rakyat adalah keputusan itu harus didahului dengan proses peradilan di Mahkamah Militer, sehingga bisa dibuktikan salah tidaknya Prabowo," ujarnya.

"Jika dimahmilkan, menantu mantan Presiden Soeharto itupun bisa membela diri, sehingga keputusan yang dijatuhkan bisa *fair*. Ini baru melegakan rakyat," kata Sazili. ❑ mdi

BUANA SIANG INI

thia Datau

Muthia Datau dan Krisis

MUTHIA Datau main film banyak orang yang tahu. Begitu pun ketika ia menjadi pemain sepakbola putri. Tapi, kalau ia unjuk kebolehan dalam urusan masak, mungkin baru mereka yang mampir ke Warung Goal saja yang mengetahuinya.

Halaman 9

INDEKS LINTAS BUANA

Nikkei-225	-309,84	ST Times	-15,68
14 988,36		933,16	917,30
		21/8	24/8

Kontras akan ke Mahkamah Internasional

Jakarta , Buana

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tetap mendesak Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto agar melepaskan ke-14 aktivis yang masih diculik oknum ABRI. Jika masalah ini tak juga diungkapkan, Kontras akan menyelesaikannya melalui mekanisme internasional, yakni lewat Mahkamah Internasional.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang jelas. Sebab, menurut Prabowo, kesembilan orang ini telah dibebaskan.

"Prabowo mengaku menculik sembilan orang. Tapi, saya tak hafal siapa saja," ujar Subagyo, seusai pengumuman keputusan DKP di Jakarta, Senin (24/8).

Menanggapi hal ini, Koordinator Badan Pekerja Kontras Munir menilai, pernyataan itu kurang terbuka. Sebab, dari 14 aktivis hilang itu pernah berada dalam satu tempat penyekapan. Penculiknya juga sama. Sebab itu, Munir minta pihak ABRI agar menjelaskan siapa saja sembilan orang yang

Kontras meyakini ABRI mengetahui ke-14 korban.

Kontras mencatat, ada 24 aktivis korban penculikan. Mereka diculik saat Pemilu 1997, SU MPR 1998, dan sekitar Mei.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Kontras, terlihat banyak institusi-institusi yang terlibat dalam kasus penculikan, tapi belum dimintai pertanggungjawabannya, yakni mulai dari Koramil Duren Sawit, Kodim Jakarta Timur, Kodim Jakarta Utara, Kodam Jaya, BIA, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya.

"Belum lagi institusi lain,

Tindakan Wiranto Dipuji

Jakarta, Buana

Keberanian Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto memberhentikan Letjen (Purn) Prabowo dari ABRI mendapat pujian dari banyak kalangan. Kusnaedi, seorang guru dari SMU Panglima Soedirman Bekasi, misalnya, menyatakan, sikap Wiranto tersebut, cermin yang terbaik dalam alam reformasi sekarang. "Keberanian Wiranto akan mengembalikan kepercayaan rakyat," kata Kusnaedi, Selasa (25/8) pagi.

Sementara itu, Masbianto, pegawai negeri sipil, menyambut baik keputusan Wiranto dengan

Perwira (DKP) tersirat bahwa Prabowo bisa saja diseret ke Pengadilan Tinggi Militer.

Dalam kesempatan terpisah, Ny Dewi Daryanto, karyawati sebuah BUMN menilai, keputusan Wiranto memberhentikan Prabowo bukan jalan pintas menutupi kesalahan utama mantan Danjen Kopassus itu.

Sama halnya dengan Masbianto, seorang supir bus PPD Supriyono mengatakan, keputusan Wiranto memberhentikan Prabowo sudah diperhitungkan secara matang. Ketegasan Wiranto dinilainya tidak berdiri sendiri. Pa-